

**Komunikasi Pemerintah Daerah Gunungkidul Dalam Menjalankan Program
Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul**

Tahun 2016-2018

Dosen Pembimbing :

Dr. Dian Eka Rahmawati, M.Si



Oleh :

Aji Pangestu Tiroau

(20150520213)

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

HALAMAN JUDUL

**Komunikasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunungkidul Dalam
Menjalankan Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Pmeberdayaan Masyarakat Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2016-2018**



Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

Aji Pangestu Tiroau

20150520213

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Komunikasi Pemerintah Daerah Gunungkidul Dalam Menjalankan Program
Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul**

**Disusun oleh:
Aji Pangestu Tiroau
20150520213**

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Tim Penguji Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada:

Hari dan tanggal : Kamis, 11 Juli 2019
Tempat : Ruang Ujian IP 1
Jam : 08:00 - 09:00 WIT

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua Penguji


Dr. Dian Eka Rahmawati, M.Si
19741227200004 163067

Penguji I


Muhammad Eko Atmojo, S.IP., M.IP
19910516201604 163 157

Penguji II


Erni Zuhriyanti, S.S., M.Si.
19760315200810 163 085

Mengetahui Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan


Drs. Muchamad Zaenuri, M.Si
19660828199403 163-081

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Aji Pangestu Tiroau

NIM : 20150520213

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. Sepanjang pengetahuan saya di dalamnya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Selanjutnya apabila dikemudian hari terbukti terdapat publikasi dan ada pihak lain yang merasa dirugikan dan menuntut, maka saya akan bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi yang menyertainya.

Yogyakarta, April 2019

Aji Pangestu Tiroau

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”.

(Q.S. Al-Baqarah,286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”.

(Q.S. Al-Insyirah,5)

“Kalau tidak bisa dikerjakan, lebih baik tidak usah dikerjakan. Tapi kalau harus dikerjakan, lakukan seefisien mungkin”

(Hyouka)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillahil'alam, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan atas dukungan serta do'a dari orang – orang tersayang, pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa bangga saya persembahkan karya tulis sederhana ini kepada :

1. Allah SWT, karena atas izin dan ridho-Nya lah, akhirnya skripsi ini dapat disusun dengan lancar dan selesai tepat pada waktunya. Segala puji syukur atas kekuasaan Allah Tuhan Semesta Alam.
2. Ayah dan Ibuku tercinta atas segala kasih sayang, dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada saya selama ini, serta yang selalu menanyakan skripsi saya sehingga saya mendapatkan dorongan dan semangat dalam mengerjakan skripsi.
3. Adikku tersayang Dinda Anjelita yang selalu memberikan hiburan, dukungan dan semangat kepada saya untuk terus menyelesaikan skripsi ini.
4. Pasangan saya Anita Purnamasari terimakasih atas dukungan yang selalu diberikan dan selalu mendengarkan keluh kesah saya.
5. Partner dan sodara saya Madya Nugroho terimakasih sudah menjadi teman saya sejak awal mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa tua.

6. Teman-teman seperjuangan skripsi saya Ika, Femil, Affifah, Diah, Adum, Ratih, Rani, yang selalu memberikan saya semangat dan terus menemani saya untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini
7. Teman jalan saya Arga, Gilang, ogoy yang bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan kuliah jogja.
8. Teman-teman ku tersayang Bima, Dejan, Tomi, Ferly, Fikriani, Youga, Defa, Ashar, Indah, Heny, Nurul, dan teman-teman saya yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu terimakasih sudah mau menjadi teman saya sejak awal maba di Jogja sampai saat ini.
9. Teman-teman kelas IP-E angkatan 2015 yang namanya tidak bisa saya sebutkan semuanya satu persatu. Intinya terimakasih sudah menjadi bagian dalam proses perkuliahan saya selama ini
10. Teman-teman Ilmu Pemerintahan UMY 2015 yang telah berjuang bersama-sama untuk meraih gelar S-1.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatu

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat, hidayat serta karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Komunikasi Pemerintah Daerah Gunungkidul Dalam Menjalankan Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2018”** sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) dan memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam pembuatan proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemampuan dan ilmunya kepada saya, sehingga saya mampu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu
2. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat dan mendoakan saya, sehingga saya mampu dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

4. Ibu Dr. Titin Purwaningsih Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Muhammad Eko Atmojo, S,IP., M.IP selaku Sekretaris jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
7. Ibu Dr. Dian Eka Rahmawati, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah berkenan dalam meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan serta saran demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
9. Staff TU Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Terimakasih atas informasi yang telah diberikan baik yang berkaitan dengan administrasi perkuliahan hingga skripsi.
10. Kepala Dinas, Kepala Bidang beserta jajaran Staff Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul, terimakasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada penulis dalam wawancara untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2015 yang telah banyak membantu, selalu menyemangati satu sama lain dalam pembuatan skripsi ini serta berjuang bersama-sama dalam mendapatkan gelar S.IP.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan didalamnya. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan penulis juga memohon adanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan skripsi ini agar menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap semoga penelitian skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian kata pengantar yang bisa penulis sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Yogyakarta, April 2019

Penulis

Aji Pangestu Tiroau

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Studi Pustaka.....	7
F. Kerangka Dasar Teori	12
1. Teori Komunikasi Pemerintah.....	12
2. Teori Kemiskinan	18
G. Definisi Konseptual.....	21
H. Definisi Operasional.....	21
I. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Unit Analisis.....	24
3. Jenis Data	24
4. Lokasi Penelitian	25
5. Teknik Pengumpulan Data	25
6. Teknik Analisa Data.....	26

BAB II.....	28
A. Gambaran Umum Kabupaten Gunung Kidul.....	28
1. Luas, Batas, dan Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Gunung Kidul 28	
2. Kondisi Demografi (Kependudukan)	31
3. Kemiskinan.....	32
4. Visi dan Misi Kabupaten Gunungkidul.....	32
5. Profil Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gunungkidul	36
6. Struktur Organisasi.....	37
BAB III	39
A. Komunikator (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa).....	40
B. Pesan (informasi)	54
C. Media.....	56
D. Komunikan.....	59
E. Kendala	61
F. <i>Feedback</i> (Umpan Balik)	64
BAB IV	68
A. KESIMPULAN	68
B. SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota D.I Yogyakarta, 2013-2017.....	2
Table 1.2 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017.....	4
Tabel 2.1 Luas Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul, 2017.....	30
Tabel 2.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul, 2017.....	31
Tabel 1.3 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017.....	32
Tabel 3.1 Pelatihan Keterampilan Dalam Berbagai Jenis Pelatihan.....	42
Tabel 3.2 Pelatihan Pengelolaan Atau Manajemen Usaha.....	43
Tabel.3.3 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Gunungkidul, 2013-2017.....	45
Tabel.3.4 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Gunungkidul, 2013-2017.....	61

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Jalur Komunikasi Pembangunan.....	14
Bagan 1.2 Model Komunikasi Lasswell.....	15
Bagan 3.1 Komunikasi Organisasi Vertikal.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Gunungkidul.....	29
Gambar 3.1 Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.....	50
Gambar 3.2 Pelatihan kegiatan dari program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.....	53
Gambar 3.2 Proses Komunikasi Dinas P3AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul dalam Program penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.....	66

ABSTRAK

Komunikasi pemerintah merupakan bagian penting dalam menjalankan suatu program salah satunya dalam program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang ada di Kabupaten Gunungkidul yang dimana program tersebut tercantum dalam Perda Nomor 2 Tahun 2015. Yang dimana setelah keluarnya Perda tersebut menyebabkan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Gunungkidul menurun setiap tahunnya, pada tahun 2015 angka kemiskinan Kabupaten Gunungkidul sebesar 21,73 dan sekarang pada tahun 2018 menjadi 17,12. Sehingga berdasar pembahasan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti pembahasan tersebut yaitu bagaimana komunikasi pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ini.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Objek penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul (DP3AKBPM&D). Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Dari hasil temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ini terjadi komunikasi vertikal antar BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul yang dimana BAPPEDA selaku pembuat program mengarahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kepentingan dalam program penanggulangan kemiskinan ini untuk menjalankan program tersebut. Yang dimana disini peneliti membahas tentang program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang program ini dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul (DP3AKBPM&D).

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh DP3AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul sebagai komunikator. DP3AKBPM&D melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai kegiatan yang ada di dalam program dan tak hanya sosialisasi langsung saja tapi dengan menggunakan media elektronik radio. Sosialisasi yang di tujukan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Gunungkidul, yang dimana hasil capaian program tersebut yaitu pengurangan angka kemiskinan, masyarakat memiliki penambahan penghasilan baru, dan masyarakat menjadi sejahtera, secara keseluruhan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sudah berjalan baik.

Kata Kunci : Komunikasi, Pemerintahan, Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup banyak. Di Indonesia sendiri ada daerah yang juga memiliki cukup tinggi jumlah angka kemiskinan yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Walaupun Yogyakarta memiliki beragam budaya dan pesona alam yang indah dan menjadikan Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota pariwisata di Indonesia yang banyak dikunjungi oleh pengunjung mancanegara maupun pengunjung internasional. Tetapi dibalik itu semua Yogyakarta juga mempunyai masalah kependudukan yang parah yaitu masalah kemiskinan yang tergolong tinggi karena masih banyaknya penduduk miskin di Kota Yogyakarta. Memang untuk saat ini kemiskinan merupakan salah satu masalah yang cukup besar di alami oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, bagaimana tidak untuk saat ini Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki angka kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa.

Table 2.1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota D.I Yogyakarta, 2013-2017

Kabupaten/kota	2013	2014	2015	2016	2017
Kulon Progo	21,39	20,64	21,40	20,30	20,03
Bantul	16,48	15,89	16,33	14,55	14,07
Gunungkidul	21,70	20,83	21,73	19,34	18,65
Sleman	9,68	9,50	9,46	8,21	8,13
Kota Yogyakarta	8,82	8,67	8,75	7,70	7,64

Sumber : BPS Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2018

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari semua kabupaten yang ada di Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi dari tahun 2013-2017. Data yang dimiliki BPS pada 2015, menunjukkan angka kemiskinan Gunungkidul hanya berselisih 0,33% lebih tinggi dengan Kulonprogo yang memiliki angka kemiskinan kedua tertinggi di Kota Yogyakarta. Adapun angkanya adalah sebesar 21,73% di Kabupaten Gunungkidul dan 21,40% di Kabupaten Kulonprogo. Dengan angka tersebut berarti menempatkan Gunungkidul sebagai kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di DIY. Dari data BPS Kota Yogyakarta tahun 2015, Kabupaten Bantul memiliki angka kemiskinan sebesar 16,33%, di Kabupaten Sleman sebesar 9,46%, dan Kota Yogyakarta memiliki angka kemiskinan sebesar 8,75%. Tingkat kemiskinan dalam pedesaan Gunungkidul lebih tinggi dibanding di perkotaan. Kondisi sumberdaya dipendesaan, biasanya dihadapkan oleh masalah kondisi tanah yang kurang subur, sedikitnya lapangan kerja, lemahnya organisasi masyarakat, ketidakmampuan masyarakat dalam menentukan harga produk pertanian yang dihasilkan, serta rendahnya mutu sumberdaya manusianya.

Dengan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2015, pemerintah Kabupaten Gunungkidul memutuskan Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, yang dimana dengan Perda tersebut diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan yang ada di Gunungkidul. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan terdapat beberapa program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Program-program tersebut ada 3 diantaranya yaitu:

- a. “Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil”.

Dengan keluarnya Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan tersebut ternyata berhasil menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul tiap tahunnya.

Table 1.2 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah Total	Prentase
2013	238 056	152 379	21,70
2014	243 847	148 390	20,83
2015	250 630	155 000	21,73
2016	264 637	139 150	19,34
2017	277 261	135 740	18,65

Sumber : BPS Kabupaten Gunung kidul Tahun 2018

Dan dari laman Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunungkidul terbaru telah mengeluarkan data persentase penduduk miskin kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018 yaitu menjadi sebesar 17,12 yang dimana turun 1,53 dari data kemiskinan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017 yaitu sebesar 18,65 (<https://gunungkidulkab.bps.go.id>). Pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul akan terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk miskin di daerahnya agar mereka dapat hidup sejahtera, tetapi karena adanya suatu keterbatasan dan ketidakberdayaan penduduk miskin itu sendiri maka sangat sulit untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul sendiripun juga sudah berjuang terus untuk mengatasi kemiskinan di Gunungkidul. Sehingga untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul membuat beberapa kebijakan, program-program maupun strategi untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut agar dapat terselesaikan. Pemerintah Daerah dalam mengatasi masalah kemiskinan itu berdasarkan atau berpedoman pada dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Penanggulangan Kemiskinan. Perda tersebut yang akan memayungi upaya pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul dalam penanggulangan kemiskinan. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan terdapat beberapa program-program yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

Komunikasi pemerintahan menurut (Hasan, 2014) merupakan penyampaian ide dan, program dan gagasan pemerintah kepada masyarakat guna menjamin berjalannya fungsi pemerintahan dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dengan tidak merugikan pihak manapun. Dalam menjalankan Perda Nomor 2 Tahun 2015 serta program-program yang terdapat di dalamnya di butuhkan komunikasi pemerintah dalam menjalankan perda tersebut, karena dengan komunikasi pemerintah antara masyarakat dapat mewujudkan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah Gunungkidul dan masyarakat sekitar agar dapat menjalankan Perda tentang Penanggulangan kemiskinan.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan tersebut telah dibuat dan program-programnya telah dilaksanakan. Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 0,69% yang pada tahun 2016 kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul sebesar 19,34% dan pada tahun 2017 menurun menjadi 18,65% (BPS, 2018).

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka saya tertarik ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai program-program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Gunungkidul dalam mengatasi

kemiskinan serta komunikasi pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan program penanganan kemiskinan. Sehingga saya disini menyusun sebuah proposal penelitian yang berjudul **“Komunikasi Pemerintah Daerah Gunungkidul Dalam Menjalankan Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2018”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaiman Komunikasi Pemerintah Daerah Gunungkidul dalam menjalankan program pengetasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang penaggulangan kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang peneliti ambil yaitu untuk mengetahui Komunikasi Pemerintah Daerah Gunungkidul dalam menjalankan Program pengetasan kemiskinan berbasis masyarakat Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2018.

D. Manfaat Penelitian

Untuk manfaa-manfaat dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pengetahuan maupun pengalaman sebagai rujukan atau referensi dalam pembuatan kebijakan khususnya mengenai pembuatan kebijakan dalam mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul.

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam pembuatan peraturan atau pembuatan program kebijakan tentang penanggulangan kemiskinan, agar peraturan atau kebijakan tersebut dapat mengatasi adanya masalah kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul.

E. Studi Pustaka

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang cukup besar yang dihadapi oleh Negara Republik Indonesia yang di karenakan angka dari kemiskinan yang sampai saat ini masih tinggi, oleh sebab itu dibutuhkan dukungan dari pemerintah dalam membuat serta menjalankan program penanganan kemiskinan agar angka kemiskinan di Negara Republik Indoseia dapat dikurangi. Penelitian seperti ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu :

No	Nama	Judul	Kesimpulan
1.	Aji Muhawarman, Dumilah Ayunigtyas, Minaniarti (2017)	Formulasi Kebijakan Komunikasi Untuk Pelaksanaan Program Pembangunan	Hasil penelitian yang telah dilakukanoelh peneliti menunjukkan hasil bahwa fungsi komunikasi yang telah dijalankan mengalami

		Kesehatan.	kemajuan yang dimana dari berjalannya komunikasi tersebut masih terdapat permasalahan baik internal maupun eksternal, unit Hubungan Masyarakat Kementerian Kesehatan dalam menjalankan fungsi komunikasi kepada masyarakat masih belum berjalan secara optimal karena belum adanya pedoman dalam menjalankan komunikasi yang akan menjadi acuan dalam mengevaluasi dan menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mengatur hal-hal yang menyangkut tentang kehumasan.
2.	Cybthia M. Bonde (2016).	Peran Komunikasi Pemerintah Dalam Pembangunan Balai Desa Makaruo Kecamatan Dumoga barat Kabupaten Bolaang Mongondow.	Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan hasil komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa masih terdapat beberapa kendala yang dimana komunikasi antara kepala desa dan sekretaris desa tidak terjalin dengan baik sehingga menyebabkan hambatan dalam pembangunan desa, akan tetapi proses pembangunan yang telah direncanakan bersama melalui komunikasi yang menjadi bagian penting dalam pembangunan balai desa Makaruo terlaksana dengan baik.
3.	Umi Chayatain dan Saudah (2016).	Model Komunikasi Pemerintah Untuk Kebijakan Akselerasi Peningkatan Status Pasar Tradisional – Modern.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah untuk kebijakan akselerasi peningkatan status pasar tradisional-modern, terlihat dari kuatnya komunikasi yang telah dibangun dengan pedagang melalui jalan musyawarah dengan mempertahankan

			komunikasi efektif dalam rangka memenuhi kebutuhan pedagang melalui kebijakan yang telah dituangkan kedalam peraturan.
4.	Mutia Dewi (2016).	Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kota Palembang Dalam Kampanye Program Palembang EMAS (Elok, Madani, Aman, Sejahtera).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang dalam kampanye program Palembang EMAS, terdiri dari dua langkah yang pertama menganalisis situasi melalui analisis tersebut akan dibuat menjadi rumusan kebijakan Palembang EMAS. Kedua setelah dilakukannya perumusan kebijakan tersebut pemerintah kota Palembang akan melakukan perencanaan program dimana dalam perencanaan tersebut akan menetapkan anggaran, SDM, dan fasilitas lainnya.
5.	Indah Sulistiani, Sumardjo, Ninuk Purnaningsih, dan Basita Ginting Sugihen (2017).	Peran Komunikasi Dalam pengembangan Energi Sosial Masyarakat Di Papua.	Hasil penelitian ini menunjukkan komunikasi program membawa pengaruh positif terhadap pengembangan energy sosial budaya masyarakat di Papua. Akan tetapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan energy sosial masyarakat masih tergolong rendah, oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kualitas komunikasi serta pihak-pihak yang berkepentingan.
6.	Syarifuddin (2014).	Komunikasi Pemerintahan dan Masyarakat Berbasis dialek Budaya Lokal	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat konjo, yang

		(Studi Kasus Proses Komunikasi Penunjang Pembangunan Berbasis Dialek Konjo pada Masyarakat di Tana Toa Kajang Kabupaten Bulukumba).	dimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat di pengaruhi oleh dialek konjo yang biasanya hanya dilakukan oleh komunitas suku Kajang di kabupaten Bulukumba. Komunikasi berbasis dialek Konjo di satu sisi menjadi penghalang bagi kemajuan masyarakat Kajang itu sendiri dikarenakan prinsip dari suku Kajang itu sendiri yaitu <i>Pasang ri Kajang</i> yang bermakna pesan anti modernisasi, sehingga menyebabkan masyarakat suku Kajang mencerminkan masyarakat yang kebutuhan berprestasinya rendah.
7.	Irma Nirwana Bokau (2013).	Peranan Komunikasi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Boyong Atas (Suatu Studi Kepala Desa).	Hasil penelitian ini menunjukkan komunikasi pemerintah dalam hal ini kepala desa yang dimana memiliki peranan dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa, sehingga diharapkan masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam upaya pembangunan desa. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan, masih adanya partisipasi masyarakat desa Boyong Atas dalam pembangunan desa akan tetapi kepala desa kurang melaksanakan proyek pembangunan, sehingga ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa Boyong Atas menjadi kurang. Kurangnya informasi dari kepala desa Boyong Atas kepada masyarakat menyebabkan pembangunan di

			desa Boyong Atas menjadi lambat, sehingga di harapkan kepala desa memperhatikan komunikasi pemerintahan agar dapat menggerakkan proyek pembangunan di desa Boyong Atas.
8.	Kirana Kawengian, Elfie Mingfkid, dan Julia T. Pantow (2017).	Peranan Komunkasi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Bersih Kampung (Studi Pada pemerintah Desa Lopan Satu Kecamatan Amurang Timur.	Hasil dari penelitian ini melihatkan peranan pemerintah dalam pelaksanaan program bersih kampung, serta pentingnya komunikasi dalam menjalankan program tersebut, adapun media komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan program bersih kampung kepada masyarakat adalah dengan pedekatan komunikasi kelompok, interpersonal, persuasive dan pedekatan instruktif, sementara pedekatan menggunakan komunikasi masa belum dioptimalkan. Dalam menjalankan program bersih kampung di desa Lopana Satu terdapat hambatan yaitu terdapat beberapa masyarakat yang masih belum berpartisipasi dalam kegiatan bersih kampung, serta kendala cuaca yang tidak dapat dipastikan, serta masih belum baiknya menyampaikan program kepada masyarakat yang masih belum optimal.

Berdasarkan dari delapan jurnal di atas, dapat dilihat memiliki kesamaan mengenai komunikasi pemerintah akan tetapi perbedaan perbedaan yang ada dari delapan jurnal tersebut yaitu pada program yang diteliti berdeda satu dengan yang lainnya. Dalam hal tersebut penelitian ini juga membahas mengenai komunikasi

pemerintahan akan tetapi hanya berbeda dengan programnya saja. Karena dalam penelitian ini Program yang akan dibahas adalah Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulanga Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Teori Komunikasi Pemerintah

Komunikasi pemerintahan yang dimana pemerintah yang berperan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikannya, dalam beberapa hal juga pemerintah dapat menjadi sebagai penampung ide atau gagasan yang diinginkan oleh masyarakat dan masyarakat juga dapat berada diposisi sebagai penyampai ide atau gagasan kepada pemerintah. Dengan demikian pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan gagasan serta ide yang telah disampaikan oleh masyarakat.

Komunikasi pemerintahan menurut Erlina Hasan merupakan penyampaian beberapa ide, gagasan, program, yang telah dibuat pemerintah kepada masyarakat guna menjamin berjalannya fungsi pemerintahan dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dengan tidak merugikan pihak manapun (Hasan, 2014).

Komunikasi pemerintahan menurut (Abidin, 2016) adalah arus penyampaian dan penerimaan yang dilakukan berdasarkan aturan formal.

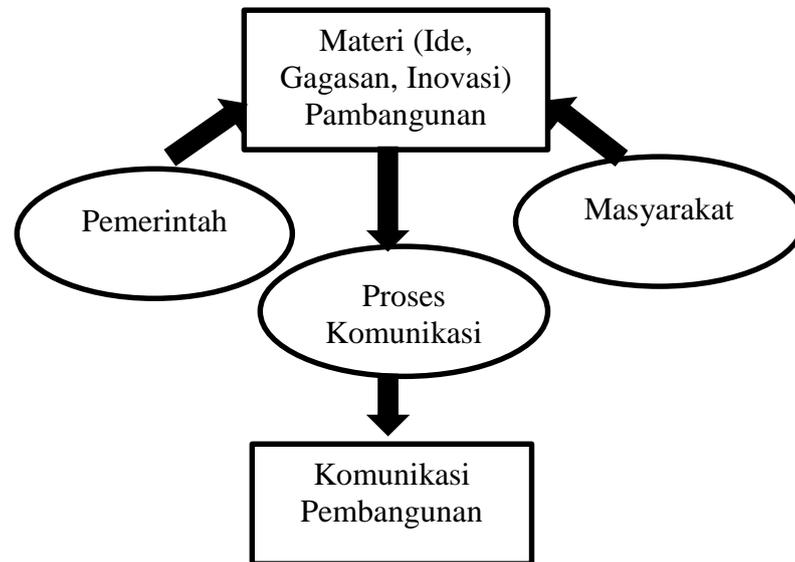
Pesan berupa informasi, ide, instruksi atau perasaan yang berhubungan dengan tindakan dan kebijakan pemerintah.

Komunikasi pemerintahan menurut model Lasswell yaitu komunikasi yang ditunjukkan kepada siapa, dan berpengaruh apa kepada komunikasi. Dimana terdapat beberapa elemen yang terdapat pada model Lasswell yaitu siapa pembicara, terdapat pesan, saluran atau medium, siapa audience dan efek yang ditimbulkan (Abidin, 2016).

Komunikasi adalah suatu yang penting dalam menjalankan sebuah organisasi pemerintahan karena tanpa komunikasi, pemerintahan tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Jika dikaitkan komunikasi pemerintahan dengan komunikasi pembangunan, pemerintah selaku pembuat kebijakan maka diperlukan adanya keselarasan komunikasi agar program untuk pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Menurut Peterson dalam, (Dilla, 2012) komunikasi pembangunan adalah usaha pembangunan yang terorganisir yang dimana menggunakan proses komunikasi serta media untuk meningkatkan perekonomian serta taraf sosial, yang dimana sering terjadi di Negara berkembang.

Bagan 1.1 Jalur Komunikasi Pembangunan



Sumber : Sumandi Dilla (2012)

1.2. Elemen Proses Komunikasi Pemerintahan

Proses komunikasi pemerintahan memiliki elemen-elemen yang akan mempermudah dalam memahami dan mengerti proses komunikasi pemerintahan. Dalam komunikasi pemerintahan menunjukkan sebuah proses pengiriman dan penerimaan pesan. Gordon dalam (Abidin, 2016) mengatakan aktivitas komunikasi pemerintahan berdasarkan elemen inti yaitu mengapa, dari siapa, tentang apakah itu, kapan, bagaimana dan melalui saluran yang mana. Komunikasi pemerintahan bertujuan untuk merubah pemahaman, perilaku birokrasi, masyarakat, dan sikap.

1.3. Komponen dan Model Komunikasi Pemerintahan

Model Komunikasi sebagai proses sederhana untuk memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dan komponen lainnya. Model

komunikasi menurut Harold Lasswell dalam (Abidin, 2016) dapat digambarkan sebagai berikut :

Bagan 1.2 Model Komunikasi Lasswell



Sumber : Yusuf Zainal Abidin (2016 : 232)

Penjelasan komponen-komponen komunikasi pada bagan diatas dalam proses komunikasi dari model komunikasi Lasswell dalam (Abidin, 2016) adalah sebagai berikut :

- a. Pengirim pesan : orang atau individu yang mengirimkan pesan.
- b. Pesan : Yaitu orang yang memiliki informasi mengirimkan informasi kepada penerima pesan, pesan tersebut dapat berupa nonverbal maupun verbal.
- c. Saluran/Media : Yaitu jalan yang akan dilalui sebuah informasi atau pesan yang diberikan pengirim informasi kepada penerima informasi.
- d. Penerima Pesan : Yaitu orang yang menerima informasi atau pesan yang telah dikirimkan.
- e. Umpan Balik : Tanggapan atau respon terhadap suatu pesan yang diterima yang dikirimkan kepada pengirim pesan.

Pada penelitian ini memakai model komunikasi Lasswell karena lebih relevan dengan topik penelitian yang dimana komponen-komponen yang ada diatas menjadi unsur penting dalam sebuah komunikasi.

1.4. Hambatan Dalam Komunikasi Pemerintahan

Dalam melakukan sebuah komunikasi tidak akan selalu berjalan lancar dan mudah pasti akan ada sebuah hambatan sama halnya dalam melakukan komunikasi pemerintahan pasti akan sering terjadi hambatan dalam proses pelaksanaannya. Menurut Simon, Smithbrugh dan Thomson dalam (Abidin, 2016) terdapat 7 tipe rintangan dalam komunikasi pemerintahan yang di anggap krisis oleh organisasi pemerintahan. Tujuh tipe rintangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan Bahasa

Masalah penggunaan bahasa merupakan adanya perbedaan budaya, tingkat pendidikan, serta cara penyampaiannya. Sehingga, informasi yang didapatkan akan sulit untuk dipahami atau sering disalahinterpretasikan.

2. Pemberian Penafsiran

Masalah pemberian penafsiran merupakan penerima komunikasi memberikan respon yang tidak sesuai atau berbeda dengan pesan yang seharusnya diperoleh, sehingga persepsi informasi akan berbeda di antara individu.

3. Perbedaan Status

Masalah perbedaan status berkaitan dengan status yang dimana penyampain komunikasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi yang

dimana komunikasi berjalan ke atas atau ke bawah melalui berbagai tingkat hirarkis.

4. Jarak Geografis

Masalah jarak geografis merupakan adanya jarak antara komunikator dan komunikan sehingga menyulitkan dalam memberikan sebuah pesan atau informasi, akan tetapi masalah ini dapat diatasi dengan perkembangan teknik dan teknologi komunikasi.

5. Ketidaksediaan Seseorangan Memberikan Informasi

Masalah ketidaksediaan merupakan keteidaksediaan seseorang memberikan atau menerima informasi yang dimana akan menjadi hambatan dalam proses komunikasi.

6. Tekanan-Tekanan

Masalah tekanan merupakan adanya tekanan dari berbagai kelompok kerja yang dimana ini akan menjadi penyebab terjadinya kesulitan dalam memberikan atau menerima informasi .

7. Pembatasan

Masalah pembatasan merupakan hanya dapat menjangkau pihak-pihak yang memiliki informasi, dan menghalangnya dari jangkauan pihak yang seharusnya menggunakannya.

2. Teori Kemiskinan

2.1. Pengertian Kemiskinan

Secara umum kemiskinan dapat diartikan sebagai kurangnya pendapatan yang diterima atau dimiliki oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau dasar. Kemiskinan yaitu merupakan standar kehidupan yang rendah, yang dimana terjadinya kekurangan materi pada beberapa orang atau segolongan orang dibandingkan standar kehidupan yang terjadi dimasyarakat umum yang bersangkutan (Abu, 2009). Mereka dapat dikatakan miskin yaitu ketika mereka tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya baik berupa kebutuhan ekonomi, pangan, dan kesehatan. Dalam masyarakat berkembang istilah kemiskinan selalu melekat dan begitu populer karena masih banyaknya orang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Istilah kemiskinan ini memang sangat mudah diucapkan tetapi begitu mudah untuk menentukan yang miskin itu yang seperti apa dan siapa yang tergolong sebagai penduduk miskin.

Selain itu, di dalam bukunya (Suyanto, 2013) ada banyak sekali pengertian kemiskinan menurut beberapa para ahli diantaranya yaitu:

“Levitan (1980) : mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak.

Schiller (1979): kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas.

Friedman (1979): kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial.

Sajogyo: kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada dibawah standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasarkan atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi”.

2.2.Ciri-ciri Kemiskinan

Pada dasarnya menurut (Suyanto, 2013) ciri-ciri kemiskinan yaitu:

Mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan pada dasarnya tidak memiliki modal ataupun keterampilan untuk membuat usaha, tidak memiliki tanah yang cukup, dan faktor produksi sendiri. Dari masalah tidak adanya faktor produksi yang dimiliki menyebabkan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat sulit.

Mereka pada umumnya tidak mempunyai pendapatan sendiri sehingga menyebabkan tidak cukupnya untuk memperoleh tanah untuk digarap ataupun modal untuk membangun sebuah usaha. Serta tingkat pendidikan yang umumnya rendah di golongan miskin menjadi salah satu faktor juga.

Masih banyaknya diantara mereka yang tinggal didaerah pedesaan yang dimana masih ada beberapa dari mereka yang tidak memiliki tanah garapan atau kalau pun ada tanah tersebut relative kecil. Pada umum pekerjaan yanag mereka lakukan menjadi pekerja kasare atau pun menjadi buruh tani.

Masih banyaknya diantara mereka yang berusia muda telah memasuki ibu kota atau telah hidup disana akan tetapi mereka masih belum memiliki skil, keterampilan, dan pendidikan yang tinggi. Sedangkan di kota yang dimana negaranya masih berkembang masih belum siap untuk menampung gerakkan urbanisasi penduduk desa tersebut.

2.3.Penyebab Kemiskinan

Menurut (Suyanto, 2013) faktor yang melatarbelakangi, akar penyebab kemiskinan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang ditimbulkan karenanya langka dan kurangnya sumber daya atau dikarenakan oleh teknologinya yang masih rendah.

Kemiskinan buatan terjadi dikarenakan oleh struktur sosial yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki kemampuan atau keahlian untuk menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas lainnya.

G. Definisi Konseptual

1. Komunikasi Pemerintah

Komunikasi pemerintahan yang dimana pemerintah yang berperan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikannya, dalam beberapa hal juga pemerintah dapat menjadi sebagai penampung ide atau gagasan yang diinginkan oleh masyarakat dan masyarakat juga dapat berada diposisi sebagai penyampai ide atau gagasan kepada pemerintah.

2. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak memiliki tempat tinggal dan tidak memiliki penghasilan yang cukup, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dikarenakan faktor perekonomian yang sulit.

H. Definisi Operasional

Indikator-indikator yang akan dianalisa dan dijadikan acuan dalam melakukan pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Pengirim Pesan/Komunikator (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul).
2. Pesan
 - a. Informasi
 - b. Data
 - c. Dapat dibuktikan/nyata

3. Media
 - a. Media Cetak
 - b. Media Elektronik
 - c. Media Siber
4. Penerima Pesan/Komunikan
5. Hambatan/Kendala
 - a. Penggunaan Bahasa
 - b. Pemberian Penafsiran
 - c. Perbedaan Status
 - d. Jarak Geografis
 - e. Ketidaksediaan Seseorangan Memberikan Informasi
 - f. Tekanan-Tekanan
 - g. Pembatasan
6. Umpan Balik/Feedback
 - a. Respon
 - b. Tanggapan atau reaksi
 - c. Saran

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan secara terencana, sistematis atau jalan untuk memperoleh jawaban pemecahan masalah terhadap segala permasalahan dan cara yang

digunakan untuk oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, dapat berupa wawancara, ataupun dokumentasi.

Menurut (Yusuf, 2014) penelitian kualitatif dapat dikatakan memiliki tujuan untuk menjawab sebuah fenomena yang terjadi ataupun pertanyaan yang muncul dengan menggunakan sebuah prosedur ilmiah melalui cara yang sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Sedangkan menurut (Corbin, 2003) penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang datanya tidak diperoleh melalui prosedur statistic ataupun berupa hitungan lainnya. Sekalipun begitu dari hasil penelitian kualitatif ini masih memungkinkan untuk dianalisis melalui perhitungan.

Sehingga peneliti mengambil penelitian kualitatif yang pada hakekatnya penilitain kualitatif merupakan penelitian riset yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Dalam metode penelitian kualitatif peneliti juga menggunakan metode pendekatan, serta menganalisa suatu permasalahan komunikasi pemerintah daerah Gunungkidul dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2018 dengan cara mewawancarai narasumber yang terlibat langsung dalam proses berjalannya program tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif,

sehingga data yang didapat akan lebih akurat, mendalam, dan bermakna sehingga tujuan yang ingin dicapai penulis dapat tercapai.

2. Unit Analisis

Unit Analisis merupakan objek nyata yang akan diteliti sesuai dengan permasalahan yang ada didalam penelitian. Dimana penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Gunungkidul, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, menurut (Moleong, 2010) merupakan informasi/data mengenai konsep penelitian yang telah di peroleh secara langsung dengan melakukan wawancara. Untuk mendapatkan data primer, bisa dilakukan dengan wawancara kepada pihak yang terlibat dalam penelitian, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul.
- b. Data sekunder, menurut (Sugiono, 2014) yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari buku, laporan, catatan, ataupun dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Gunungkidul provinsi D.I Yogyakarta, yaitu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, pertanyaan ini akan dilakukan kepada orang yang menjadi unit analisis penelitian yang dianggap memiliki data mengenai unit analisis penelitian. Wawancara akan dilakukan di pemerintah Kabupaten GunungKidul, yaitu di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul yaitu Bapak Subiyantoro, SIP selaku Kepala Bidang Pemberdayaan masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gunungkidul yaitu Bapak Hadi Hendro Prayoga, S.IP. selaku Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan, Ibu Sumarti dan Bapak Agus selaku masyarakat yang mengikuti program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

b. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data ataupun catatan-catatan penting yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan sehingga data yang diperoleh menjadi sah, lengkap dan bukan berdasarkan perkiraan saja melainkan dari mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen. Dokumentasi ini diambil untuk memperoleh data-data, foto, surat kabar, serta catatan lapangan seperti Perda Penanggulangan Kemiskinan di kabupaten Gunungkidul, dan data jumlah kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis, dari data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan, dengan cara memasukkan data ke dalam kategori serta menjabarkannya. Adapun komponen utama dalam proses analisis ini meliputi reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

(Sutopo, 2002) berpendapat bahwa “Reduksi data adalah bagian dari proses analisis, yang mempertegas, memperpendek, membuat focus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan”.

b. Penyajian Data

Alur penting dari kegiatan analisis data penyajian data. Menurut (Huberman, 2007) “penyajian itu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan”.

Penyajian data dapat berupa rakitan dari sebuah organisasi informasi yang memungkinkan untuk membuat kesimpulan riset dapat dilakukan. Sajian data dapat berupa, gambar, matriks atau skema, table. Semuanya disusun secara teratur untuk mempermudah pemahaman informasi.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan diperoleh bukan hanya sampai pada akhir pengumpulan data, melainkan suatu verifikasi yang berupa penaggulangan dengan melihat kembali field note (data mentah) agar kesimpulan yang diambil lebih kuat dan bias dipertanggung jawabkan.

Komponen utama tersebut merupakan suatu rangkaian dalam proses analisis data yang satu dengan yang satu dengan yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan, dimana komponen yang satu merupakan langkah menuju komponen yang lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif tidak bisa mengambil salah satu komponen saja. Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari suatu proses penelitian yang tidak dapat terpisahkan dari proses sebelumnya, karena merupakan satu kesatuan.

BAB II

DESKRIPSI UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Gunung Kidul

1. Luas, Batas, dan Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Gunung Kidul

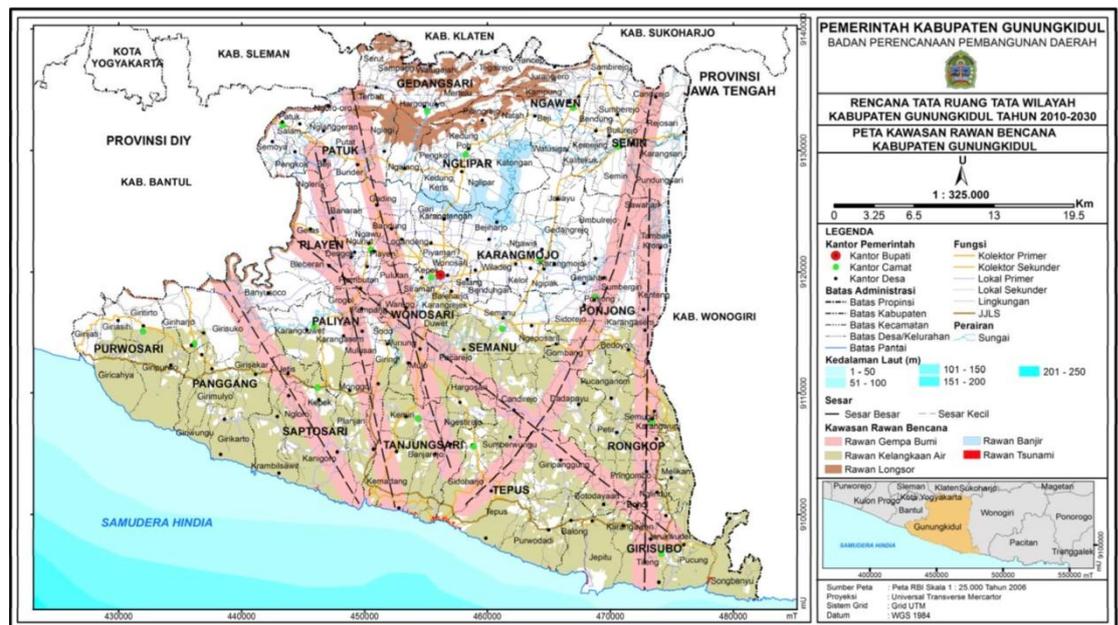
Kabupaten GunungKidul merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Ibu Kota yang bernama Wonosari yang terletak 39 km sebelah tenggara dengan Kota Yogyakarta.

Kabupaten GunungKidul memiliki luas wilayah yaitu 1.485,36 km² atau sekitar 46,63 % dari besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas wilayah dirinci sebagai berikut :

- a. Berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah yang terletak di sebelah Utara.
- b. Berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di sebelah Barat.
- c. Berbatasan dengan Kabupten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah yang terletak di sebelah Timur.
- d. Berbatasan dengan Samudra Hindia yang terletak di sebelah Selatan.

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Gunungkidul



Secara geografis Kabupaten Gunungkidul berada pada $7^{\circ}46' \text{ LS}$ - $8^{\circ}09' \text{ LS}$ dan $110^{\circ}21' \text{ BT}$ - $110^{\circ}50' \text{ BT}$, berada di bagian tenggara dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul juga terbagi menjadi 18 kecamatan yang didalamnya terdapat 144 desa dan 1.431 padukuhan, dengan rincian pembagian wilayah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Luas Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul, 2017

No.	Kecamatan	Luas (km²)	Persentase Terhadap Luas Gunungkidul (%)
1	Panggung	99,80	6,72
2	Purwosari	71,76	4,83
3	Paliyan	58,07	3,91
4	Saptosari	87,83	5,91
5	Tepus	104,91	7,06
6	Tanjugasari	71,63	4,82
7	Rangkop	83,46	5,62
8	Girisubo	94,57	6,37
9	Semanu	108,39	7,30
10	Ponjong	104,49	7,03
11	Karangmojo	80,12	5,39
12	Wonosari	75,51	5,08
13	Playen	105,26	7,09
14	Patuk	72,04	4,85
15	Gedangsari	68,14	4,59
16	Nglipar	73,87	4,97
17	Ngawen	46,59	3,14
18	Semin	78,98	5,31
Jumlah		1.485,36	100,00

Sumber : Gunungkidul Dalam Angka 2018

2. Kondisi Demografi (Kependudukan)

Pertumbuhan penduduk dalam sebuah wilayah merupakan kejadian yang dipengaruhi oleh waktu, dan juga dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu angka kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Berikut jumlah pertumbuhan penduduk Kabupaten Gunungkidul :

Tabel 2.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul, 2017

No.	Kecamatan	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Panggung	3,94	286,87
2	Purwosari	2,87	291,40
3	Paliyan	4,31	540,83
4	Saptosari	5,07	421,35
5	Tepus	4,72	328,23
6	Tanjugasari	3,80	387,41
7	Rangkop	3,98	348,03
8	Girisubo	3,28	253,34
9	Semanu	7,66	515,44
10	Ponjong	7,37	514,68
11	Karangmojo	7,22	657,25
12	Wonosari	11,66	1 126,51
13	Playen	8,07	559,14
14	Patuk	4,49	454,90
15	Gedangsari	5,22	558,82
16	Nglipar	4,40	433,98
17	Ngawen	4,68	732,99
18	Semin	7,26	670,78
Jumlah		100,00	491,04

Sumber : Gunungkidul Dalam Angka Tahun 2018

3. Kemiskinan

**Tabel 1.3 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di kabupaten
Gunungkidul Tahun 2013-2017**

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah Total	Prentase
2013	238 056	152 379	21,70
2014	243 847	148 390	20,83
2015	250 630	155 000	21,73
2016	264 637	139 150	19,34
2017	277 261	135 740	18,65

Sumber : *BPS Kabupaten Gunung kidul Tahun 2018*

Dan dari laman Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunungkidul terbaru telah mengeluarkan data persentase penduduk miskin kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018 yaitu menjadi sebesar 17,12 yang dimana turun 1,53 dari data kemiskinan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017 yaitu sebesar 18,65 (<https://gunungkidulkab.bps.go.id>).

4. Visi dan Misi Kabupaten Gunungkidul

a. Visi

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021, serta berdasarkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Hj. Badingah,S.Sos. dan Dr.H. Immawan Wahyudi,M.Hum irumuskan sebagai berikut :

“Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan budaya menuju masyarakat yang berdaya saing,

maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021”. Seperti yang dikemukakan visi Kabupaten Gunungkidul adalah untuk menjadi Kabupaten Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata baik secara skala regional, nasional, dan internasional. Kondisi ini telah ditandai dengan :

1. Obyek wisata dengan sarana dan prasarana yang telah memenuhi standar :
 - a. Fasilitas umum (parker, ruang terbuka public, dan tempat ibadah)
 - b. Tersedianya sarana penyedia air bersih, pengelolaan sanitasi, dan persampahan
 - c. Pos terpadu (Layanan Informasi, Kesehatan, SAR)
 - d. Jaringan listrik
 - e. Sarana telekomunikasi
2. Akses menuju obyek wisata dalam kondisi baik.
3. Manajemen pengelolaan onyek wisata yang berkualitas.
4. Menajemen pelayanan kepariwisataan yang berkualitas.
5. Penyelenggaraan *event* yang modern dan professional serta mendukung peningkatan daya tarik wisata.
6. Ketersediaan penginapan, hotel, restoran, dan akomodasi yang memadai.

b. Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun untuk menentukan kerangka, dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan untuk mencapai dan menentukan jalan yang akan di tempuh untuk mencapai visi.

Untuk mencapai visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2021, ditetapkan misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Misi ini adalah upaya pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang berlandaskan asas prinsip pemerintahan yang baik melalui *stake holders* pemerintahan, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan manajemen pembangunan daerah yang baik.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Misi

ini adalah upaya Pemerintah Daerah dalam membangun sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sehingga dapat menjadi pilar pokok pembangunan daerah.

3. Menetapkan pengelolaan pariwisata yang professional. Misi ini adalah

upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kegiatan wisata yang ada di Kabupaten Gunungkidul yang dimna dikung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang telah disediakan oleh masyarakat, pengusaha, perguruan tinggi, pemerintah dan pemerintah daerah.

4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah. Misi ini adalah upaya Pemerintah Daerah dalam membangun hubungan antar wilayah yang dimana melalui peningkatan kondisi jalan, sarana prasarana, transportasi, serta jaringan telekomunikasi dalam rangkan pertumbuhan pembangunan dan dukungan bagi pengembangan lokasi wisata.
5. Mengembangkan sector-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif. Misi ini adalah upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkandaya saing tempat-tempat unggulan daerah yang dimana menjadi penggerak dan penguat bagi perekonomian daerah yang meliputi bidang pertanian, industry kecil, usaha mikro kecil dan menengah, dan koperasi. Peran pemerintah yang menjadi fasilitator bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih mudah dalam berusaha, sehingga perekonomian masyarakat dapat lebih berkembang dan semakin kuat.
6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Misi ini adalah upaya Pemerintah Daerah dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serata untuk meningkatkakan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup yang lestari.

5. Profil Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gunungkidul

Dalam menjalankan tugas sebagaimana yang tertera dalam peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan umum di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
4. Pelaksanaan pembinaan peningkatan peran, partisipasi, dan perlindungan perempuan dan anak.
5. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan partisipasi, komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana.

6. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan partisipasi, sarana dan prasarana serta usaha ekonomi desa dan masyarakat.
7. Pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa.
8. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
9. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
11. Pengelolaan UPT.

6. Struktur Organisasi

Susunan organisasi menurut kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas : Sujoko, S.Sos

- b. Seketariat : Dra. Sri Purwaningsih, Apt,M.Kes
 - 1. Kepala Subbagian Umum : Bagda Sumpena, SE
 - 2. Kepala Subbagian Perencanaan : Parmiyati, S.Sos
 - 3. Kepala Subbagian Keuangan : Suharti, S.Sos
- c. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :
Dra. Rumi Hayati
 - 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan : Sri Mulat Widiningsih,
S.Sos
 - 2. Kepala Seksi Perlindungan Anak : Tomy Darlinanto, Sh,M,Hum
- d. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana : Dra.
Dwi Iswantini
 - 1. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk : Moh. Amirudin, S.sos
 - 2. Kepala Seksi Keluarga Berencana : Drs. Mahmud Khumaidu
- e. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Subiyantoro, SIP
 - 1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Partisipasi : Suharto, SH
 - 2. Kepala Seksi Usaha Perekonomian Masyarakat desa : Khoiru
Rahmat Widiyanto,SE,MM
- f. Kepala Bidang Pemerintahan Desa : Muhammad Farkhan,S.Sos,M.Ap
 - 1. Kepala Seksi Kekayaan Desa : Wening Estu Utami, BSc
 - 2. Kepala Seksi Keuangan Desa : Dra. Rustiningsih Tavipsiwati
 - 3. Kepala Seksi Bina Administrasi dan Perangkat Desa :
Kriswantoro,S.STP.MM

BAB III

PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan menunjukkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan dengan yang peneliti temukan dilapangan saat penelitian berlangsung yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini yaitu peneliti akan memfokuskan pada Komunikasi Pemerintah Daerah Gunungkidul dalam menjalankan program pengetasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2017.

Sebagai langkah dalam menampilkan data maka akan dilanjutkan dengan pembahasan hasil temuan peneliti, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selain itu dari hasil penelitian ini juga menampilkan beberapa data yang dapat menunjang penelitian **“Komunikasi Pemerintah Daerah Gunungkidul dalam menjalankan program pengetasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2018”**.

Seperti yang telah dijabarkan pada bab diatas sebelumnya, maka komunikasi pemerintahan daerah dalam program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini akan dianalisis berdasarkan pada indikator-indikator definisi operasional penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

A. Komunikator (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa)

Komunikator atau pihak pertama yang memulai suatu hal atau pembahasan untuk melakukan sebuah percakapan atau komunikasi. Orang tersebut bisa disebut dengan sumber pesan, yaitu orang yang pertama kali memulai komunikasi dengan mengirim sebuah pesan kepada penerima pesan atau komunikan.

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai komunikator dalam penelitian ini yang akan menjadi komunikator dalam penelitian ini yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul, khususnya di Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul menyampaikan serta melaksanakan sebuah pesan yang khususnya kepada para masyarakat Kabupaten Gunungkidul pesan tersebut yaitu mengenai Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di kabupaten Gunungkidul.

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat ini diluncurkan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat memiliki tujuan yaitu untuk mengetaskan kemiskinan atau mengurangi angka kemiskinan. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu Bapak Subiyantoro, SIP. Dalam wawancaranya :

“...tujuan dari program tersebut yaitu untuk mengentaskan kemiskinan atau mengurangi angka kemiskinan yang ada, yang dimana program ini berupaya untuk memunculkan semangat sendiri dari masyarkat, jadi ketika masyarakat hanya diberikan bantuan fisik masyarakat menjadi tidak memiliki kapasitas dan kemampuan akan tetapi kalau dibantu dengan pemberdayaan masyarakat akan memiliki kapasitas atau kemampuan sendiri”

Dalam wawancara yang dijelaskan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Yaitu Bapak Subiyantoro, SIP. di atas dapat disimpulkan bahwa Program Penaggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat ini sangat membantu untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam menyukseskan program penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul yaitu :

1. Pelatihan Keterampilan Dalam Berbagai Jenis Pelatihan

Pelatihan keterampilan merupakan proses pendidikan jangka pendek yang dimana bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia serta kreatifitas, melalui berbagai macam kegiatan dan pelatihan, sehingga dapat membantu untuk mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan tugas, baik sekarang maupun dimasa yang akan mendatang. Adapun pelatihan yang dilakukan adalah:

Tabel 3.1 Pelatihan Keterampilan Dalam Berbagai Jenis Pelatihan

2016		2017		2018	
Kegiatan	Jenis	Kegiatan	Jenis	Kegiatan	Jenis
Pelatihan Keterampilan Dalam Berbagai Jenis Pelatihan	1.Pelatihan Pengurusan BUMDES 2.Pelatihan keluarga harapan 3.pembinaan desa prima 4.pelatihan peoduk unggulan kawasan perdesaan	Pelatihan Keterampilan Dalam Berbagai Jenis Pelatihan	1.Pelatihan Pengurusan BUMDES 2.Pelatihan keluarga harapan 3.pembinaan desa prima 4.pelatihan peoduk unggulan kawasan perdesaan	Pelatihan Keterampilan Dalam Berbagai Jenis Pelatihan	1.Pelatihan Pengurusan BUMDES 2.Pelatihan keluarga harapan 3.pembinaan desa prima 4.pelatihan peoduk unggulan kawasan perdesaan

Jadi dengan adanya pelatihan keterampilan ini merupakan suatu kegiatan yang berdampak baik untuk masyarakat, agar masyarakat sendiri dapat memiliki keterampilan atau bahkan dapat membuat suatu usaha dengan keterampilan yang telah mereka miliki sehingga masyarakat dapat memiliki penghasilan tambahan.

2. Pelatihan Pengelolaan atau Manajemen Usaha

Pelatihan pengelolaan atau manajemen usaha merupakan proses pendidikan kepada masyarakat dalam memberikan pondasi dasar untuk menjalankan usaha sehingga masyarakat siap dalam menghadapi berbagai masalah ataupun kendala yang akan datang dimasa mendatang. Adapun pelatihan yang dilakukan adalah :

Tabel 3.2 Pelatihan Pengelolaan atau Manajemen Usaha

2016		2017		2018	
Kegiatan	Jenis	Kegiatan	Jenis	Kegiatan	Jenis
Pelatihan Pengelolaan atau Manajemen Usaha	1.Pelatihan manajemen pasar desa 2.Pelatihan manajemen pegelolaan BUMDES 3.Pembinaan	Pelatihan Pengelolaa n atau Manajemen Usaha	1.Pelatihan manajemen pasar desa 2.Pelatihan manajemen pegelolaan BUMDES 3.Pembinaan	Pelatihan Pengelolaan atau Manajeme n Usaha	1.Pelatihan menajeme n pasar desa 2.Pelatihan menajeme n pegelolaan

	lembaga ekonomi desa 4.Pembinaan pengelolaan keuangan desa		lembaga ekonomi desa 4.Pembinaan pengelolaan keuangan desa		BUMDES 3.Pembinaan lembaga ekonomi desa 4.Pembinaan pengelolaan keuangan desa
--	--	--	--	--	---

Jadi dengan adanya pelatihan ini masyarakat akan memperoleh hasil yang maksimal dalam menjalankan usaha, yang dimana mereka telah mengetahui ilmu dasar dalam menjalankan sebuah usaha, sehingga ketika mereka mendapat sebuah masalah dalam menjalankan usaha mereka dapat menemukan solusi untuk mengatasinya.

3. Bedah Rumah

Bedah rumah merupakan kegiatan yang dimana masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak huni serta masyarakat yang belum memiliki jamban akan di bantu oleh pemerintah daerah, untuk rumah dan jambannya akan diperbaiki sehingga layak huni, sehingga tercipta masyarakat yang sehat.

Jadi dengan adanya kegiatan ini akan membantu masyarakat yang rumahnya masih kurang layak huni dan masyarakat yang tidak memiliki jamban untuk di perbaiki.

Dapat disimpulkan dari ketiga kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk menyukseskan Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sangat berperan penting untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

Program penanggulangan kemiskinan ini sangat berdampak baik bagi masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang dimana pada saat perda ini ditetapkan tahun 2015, angka kemiskinan Kabupaten Gunungkidul berada pada 21,70 dan setelah berjalanya program penanggulangan kemiskinan ini angka kemiskinan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017 telah menjadi 18,65. Seperti yang telah dikemukakan oleh Bapak Subiyantoro, SIP selaku Kepala Bidang Pemberdayaan masyarakat, bahwa :

“dengan adanya program penanggulangan kemiskinan ini sangat jelas masyarakat sangat terbantu dan sebagai mana kita lihat juga angka kemiskinan yang ada di kabupaten Gunungkidul juga tiap tahunnya menurun”

Tabel 3.3
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Gunungkidul, 2013-2017

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2013	238 056	152 379	21,70
2014	243 847	148 390	20,83
2015	250 630	155 000	21,73
2016	264 637	139 150	19,34
2017	277 261	135 740	18,65

Sumber : *BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018*

Dan dari laman Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunungkidul terbaru telah mengeluarkan persentase penduduk miskin Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018 yaitu menjadi sebesar 17,12 yang dimana turun 1,53 dari data kemiskinan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017 yaitu sebesar 18,65 (<https://gunungkidulkab.bps.go.id>). Sehingga dari hasil wawancara diatas dapat menunjukkan bahwa Program Penanggulangan Kemiskinan ini berjalan dengan efektif dan berhasil dalam menguragi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

Setelah adanya program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul ini sangat membantu dan memberikan dampak positif yang khususnya bagi masyarakat Kabupaten Gunungkidul karena dengan adanya Program Penanggulangan Kemiskinan ini angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul menurun tiap tahunnya, warga yang rumahnya masih terbuat dari kayu menjadi rumah permanen atau semi permanen, mengasah keterampilan warga dalam berusaha dan berkreatifitas, dan warga yang belum memiliki jamban telah memiliki jamban.

Dalam menjalankan Program Penanggulangan Kemiskinan ini juga dapat membantu masyarakat tak hanya secara fisik tetapi secara kapasitas masyarakatnya juga, dengan berupa pelatihan-pelatihan dan bantuan. Adanya hasil setelah Program Penanggulangan Kemiskinan dijalankan

yakni menurut Bapak Subiyantoro, SIP selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, bahwa :

“...yang jelas dapat kita lihat dari angka kemiskinannya menurun jadi dapat dilihat dari penurunan tersebut pasti ada perubahan-perubahan seperti rumahnya sudah permanen atau semi permanen, rumahnya sudah memiliki jamban, dan adanya penghasilan tambahan”

Jadi dapat disimpulkan hasil wawancara diatas terlihat bahwa hasil setelah Program Penanggulangan Kemiskinan ini dijalankan yaitu terjadi pengurangan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Gunungkidul dan menjadikan masyarakatnya memiliki kehidupan yang lebih baik.

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat ini diberikan untuk masyarakat yang kekurangan dan dengan adanya dan berjalannya program ini sangat menguntungkan sekali bagi masyarakat yang kekurangan sehingga dapat membantu mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul ini yaitu sebagai komunikator dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan

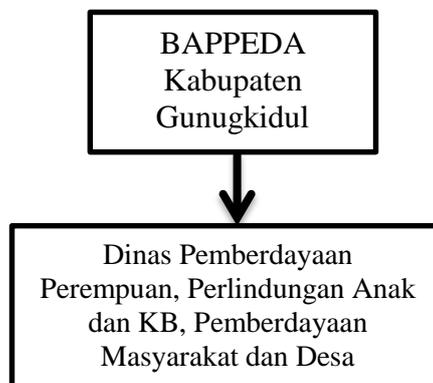
Masyarakat untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan yang ada dalam program tersebut, dan telah disampaikan sebelumnya bahwa komunikator merupakan pihak yang memberikan sebuah pesan kepada komunikan. Yang dimana pesan yang telah disampaikan oleh komunikator kepada komunikan maka akan tercipta sebuah komunikasi.

Menurut (Robbins, 2001) komunikasi vertikal adalah komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam organisasi, yang dimana komunikasi itu mengalir dari satu tingkat yang lebih tinggi atau ke tingkat yang lebih rendah secara timbal balik.

Dari teori komunikasi vertikal diatas dapat dilihat dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan ini juga terjadi komunikasi vertikal yang dimana dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul selaku pembuat Program Penanggulangan Kemiskinan yang dimana program tersebut diarahkan lagi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kepentingan dalam program penanggulangan kemiskinan ini . Dalam Program Penanggulanagan Kemiskinan ini terbagi menjadi tiga program, program pertama yaitu program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, kedua yaitu program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan ketiga program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Dimana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki kepentingan masing-masing sesuai dengan tujuan program penanggulangan kemiskinan dan disini Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul memiliki kepentingan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat untuk mendukung berjalannya program tersebut berjalan dengan baik, serta kepada para masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang menjadi penerima program.

Bagan 3.1 Komunikasi Organisasi Vertikal



Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Hadi Hendro Prayoga, S.IP. selaku Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gunungkidul dalam wawancaranya :

“ dalam program penanggulangan kemiskinan ini BAPPEDA berperan sebagai pembuat program dan mengkoordinasi kepada dinas-dinas terkait mengenai program penaggulangan kemiskinan ini sehingga program ini dapat berjalan baik”

Jadi dapat dilihat bahwa disini terjadi komunikasi vertikal antara BAPPEDA dan dians-dinas yang berkepentingan dalam berjalanya program penaggulangan kemiskinan ini.

Gambar 3.1 Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan



Dalam melakukan penyampaian komunikasi harus dilakukan dengan benar dan tepat sehingga masyarakat kabupaten Gunungkidul dapat memahami mengenai Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat ini. Dengan adanya komunikasi yang baik antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Gunungkidul maka akan tercapai sebuah keberhasilan dari Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat ini. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Subiyantoro, SIP selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dinas P3AKBPM&D dalam wawancaranya, bahwa :

“...program penanggulangan kemiskinan ini kan tercantum dalam Perda nomor 2 tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan yang dimana BAPPEDA selaku perencananya, dan piha-pihak yang berperan yaa.. semua Oraganisasi Perangkat daerah (OPD), dan yang khususnya yang menangani kemiskinan berbasis pemberdayaan masyrakat yaitu yang lebih memiliki tupoksi pemberdayaan masyarakat...”

Dapat dilihat bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Gunungkidul bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menjalankan Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, agar program tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar dan mencapai suatu tujuan.

Adapun komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Gunungkidul kepada masyarakat miskin di Kabupaten Gunungkidul, antara lain yaitu sebagai berikut :

a. Sosialisasi

Menurut Nasution, 2004 : 99 dalam (Setiawan, 2014) menjelaskan bahwa sosialisasi dalam pengertian secara umum yaitu merupakan suatu proses penyebaran informasi-informasi baru terhadap masyarakat sehingga masyarakat yang menerima informasi tersebut memahami dan mengetahui tujuan dari sebuah informasi yang baru. Dalam menjalankan sosialisasi ada hal penting didalamnya yang tidak bisa lepas yaitu komunikasi karena komunikasi merupakan alat kegiatan sosialisasi yang penting, yaitu sebagai alat dalam proses penyebarluasan suatu informasi atau suatu program baru yang akan disosialisasi kepada masyarakat.

Dari pengertian diatas sosialisasi merupakan suatu bentuk pemberitahuan atau penyampaian informasi yang memiliki tujuan agar masyarakat mengetahui suatu informasi-informasi yang baru.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul juga melakukan sosialisasi tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan yang ada dalam program tersebut kepada masyarakat Kabupaten Gunungkidul, yang dimana menjadikan sosialisasi sebagai salah satu bentuk komunikasi yang efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat ini. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Subiyantoro, SIP selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas P3AKBPM&D dalam wawancaranya, bahwa :

“...kita melakukan sosialisasi mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang ada dalam program penanggulangan kemiskinan ini, dan lebih berfokus pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki informasi lebih”

Dari penjelasan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul melakukan sosialisasi kepada masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Gunungkidul dengan melakukan sosialisasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam Program Penanggulangan

Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sehingga membuktikan bahwa program ini berdampak positif bagi masyarakat dan menjadikan media sosialisasi sebagai media yang efektif. Berikut merupakan salah satu sosialisasi kegiatan yang telah dilaksanakan :

Gambar 3.2 Pelatihan kegiatan dari program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat



b. *Face to face*

Dalam *face to face* ini yaitu dimana dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul secara langsung bertatap muka dengan masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Gunungkidul dan memberi tahu atau memberikan informasi mengenai adanya Program Penanggulangan kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul bertujuan untuk memberitahu dan memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sehingga masyarakat yang

mengikuti program penanggulangan kemiskinan ini mendapatkan informasi dan dapat memahami keutungan dalam program ini. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Subiyantoro, SIP selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dinas P3AKBPM&D dalam wawancaranya, bahwa :

“kami melakukannya secara langsung yang dimana melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan dalam program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat”

Jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul melakukan *face to face* secara langsung dimana mereka melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat secara langsung mengenai kegiatan-kegiatan yang ada dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

B. Pesan (informasi)

Pesan dalam melakukan sebuah komunikasi yaitu berupa informasi yang akan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan yang dimana informasi tersebut bersifat nyata, dapat dipercaya atau fakta. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan pesan atau informasi dalam penelitian ini, pesan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sebuah informasi yang sudah disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul

kepada masyarakat miskin yang ada di Kabupten Gunungkidul. Pesan tersebut berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Adapun informasi-informasi yang telah disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul kepada masyarakat miskin yang ada di kabupaten Gunungkidul, yaitu berupa penjelasan terkait program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Adapun materi-materi yang disampaikan yaitu sebagai berikut :

1. Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Penjelasan tujuan adanya program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
3. Penjelasan mengenai kegiatan-kegiatan apa saja dalam program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Pejelasan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada didalam program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
5. Penjelasan mengenai bagaimana kedepannya dengan adanya program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Materi-materi informasi tersebut mengenai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat

dijelaskan pada saat sosialisasi kepada masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan masyarakat informasi kepada masyarakat tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan masyarakat dan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan didalamnya, sehingga masyarakat semakin yakin mengenai program ini dan dapat memiliki keutungan bagi masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.

C. Media

Media merupakan alat komunikasi yang berfungsi sebagai alat penyampai sebuah pesan dari komunikator (pemilik pesan) kepada komunikan (penerima pesan) dengan begitu akan tercipta sebuah komunikasi.

Media merupakan hal yang sangat penting dalam berjalanya sebuah komunikasi karena dengan adanya media dapat mempermudah proses komunikasi itu sendiri. Karena dalam komunikasi yang baik membutuhkan suatu media untuk menyalurkan pesan-pesan yang akan di samapaikan kepada penerima pesan.

Adapun media yang digunakan dalam meberikan informasi kepada kepada masyarakat, sehingga tercipta sebuah komunikasi yaitu melalui dua media yaitu dengan menggunakan media lisan dan media elektronik.

Seperti yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Gunungkidul mereka menggunakan media lisan dan media elektronik dalam memberikan informasi terkait program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

Berikut ini merupakan wawancara yang disampaikan bapak Subiyantoro, SIP selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul, mengatakan bahwa :

“dalam menyampaikan atau menginformasikan kepada masyarakat mengenai program ini dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam program ini kami menggunakan media lisan dan media elektronik. Media lisan yang kami gunakan yaitu dengan mengadakan sosialisasi-sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, sedangkan media elektronik yang kami gunakan yaitu dengan melalui saluran radio”

Bedasarkan hasil wawancara di atas mengenai media apa saja yang digunakan dalam penyampaian informasi terkait program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ini kepada masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Gunungkidul maka penulis dapat lebih menjelaskan secara rinci sebagai berikut :

1. Media lisan

Media lisan yang di gunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul dalam menyampaikan informasi terkait program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan

masyarakat yaitu dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat.

2. Media elektronik

Media elektronik yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul untuk menyampaikan sebuah informasi terkait adanya program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan kegiatan-kegiatan yang ada didalamnya kepada masyarakat yakni melalui siaran radio.

Jadi dari media-media komunikasi yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul media lisan merupakan media yang paling efektif dalam menyampaikan sebuah informasi. Seperti yang disampaikan disampaikan bapak Subiyantoro, SIP selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul, dalam wawancaranya :

“dalam menyampaikan sebuah informasi media lisan menjadi media yang paling efektif karena dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi dapat memudahkan masyarakat untuk mengerti secara cepat mengenai kegiatan yang akan dijalankan didalam program ini”

Dengan demikian menurut hasil wawancara penulis dengan narasumber bahwa media komunikasi yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul, media yang paling efektif yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi terkait dengan adanya program penanggulangan berbasis pemberdayaan masyarakat ini yaitu dengan media lisan. Karena dengan media lisan akan lebih mempermudah dan lebih cepat dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

D. Komunikator

Komunikator adalah orang yang menerima pesan dari seorang komunikator atau pembawa pesan. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai komunikator dalam penelitian ini, yang dimana komunikator dalam penelitian ini yaitu para masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

Seperti yang telah dijelaskan komunikator adalah seorang yang menerima pesan atau informasi dari seorang komunikator atau pembawa pesan. Dan ketika komunikator memberikan tanggapan atau respon kepada komunikator maka disitulah akan terjadi sebuah komunikasi.

Pada penelitian ini para masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Gunungkidul menjadi penerima pesan atau informasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul yang dimana sebagai sumber dari komunikasi tersebut.

Para masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Gunungkidul sangat antusias dengan adanya program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ini dan berbagai kegiatan didalamnya, yang dimana program ini dikeluarkan pemerintah. Dengan adanya program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul ini sangat membantu masyarakat baik secara fisik maupun mental dan dimana dengan adanya program ini sangat menguntungkan bagi masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Masyarakat mengetahui adanya program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ini dari sosialisasi-sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul mengenai penjelasan program ini beserta kegiatan yang akan dilakukan.

Dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul ini sudah cukup baik dalam mengkomunikasikan mengenai Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat ini karena masyarakat dapat dengan cepat memahami mengenai tujuan dari program ini beserta kegiatan-kegiatan yang ada didalamnya. Seperti yang telah disampaikan oleh ibu Sumarti salah satu masyarakat yang mengikuti Program ini dalam wawancaranya mengatakan :

“saya merasa terbantu dengan adanya program ini, dan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat membantu masyarakat di Kabupaten Gunungkidul. Dan menurut saya semua

masyarakat disini juga merasa senang dan terbantu dengan adanya program ini juga, dan saya harap program ini akan terus berlanjut”

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat ini sangat membantu dan menguntungkan sekali bagi masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Gunungkidul selain dapat membantu masyarakat dalam menangani masalah mereka, program ini juga sangat berdampak bagi pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 3.4 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah Total	Prentase
2013	238 056	152 379	21,70
2014	243 847	148 390	20,83
2015	250 630	155 000	21,73
2016	264 637	139 150	19,34
2017	277 261	135 740	18,65

Sumber : BPS Kabupaten Gunung kidul Tahun 2018

Dan dari laman Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunungkidul terbaru telah mengeluarkan data persentase penduduk miskin kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018 yaitu menjadi sebesar 17,12 yang dimana turun 1,53 dari data kemiskinan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017 yaitu sebesar 18,65 (<https://gunungkidulkab.bps.go.id>).

E. Kendala

Dalam bab ini penuliskan akan menjelaskan mengenai kendala atau hambatan dalam penelitian ini. Kendala merupakan suatu rintangan

atau halangan yang menghambat suatu proses dari sebuah kegiatan. Adapun kendala yang dihadapi dalam menjalan Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat ini, seperti yang telah disampaikan oleh bapak Subiyantoro, SIP selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul, dalam wawancaranya :

“kendalanya yaitu dalam segi dana yang dimana dana kabupaten Gunungkidul belum cukup besar, dan jumlah masyarakat miskinnya masih tergolong banyak sehingga dalam pemerataan programnya masih belum cukup merata secara keseluruhan, dan masih adanya beberapa masyarakat yang belum terdaftar dalam program”

Dengan demikian hasil wawancara penulis dengan narasumber terkait kendala yang dihadapi dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat tersebut yaitu dalam menjalankan program ini masih terbatasnya dana yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul. Dengan terbatasnya dana tersebut membuat proses pemerataan program penanggulangan kemiskinan menjadi lumayan sulit karena terbatasnya dana. Kendala lain yang dihadapi yaitu masih ada beberapa masyarakat yang belum terdaftar dalam program penanggulangan kemiskinan ini sehingga menyebabkan kecemburuan antar masyarakat yang terdaftar dan masyarakat yang tidak.

Namun Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul ini

tidak menyerah menghadapi kendala tersebut. Mereka terus berjuang untuk melawan kendala tersebut dengan cara mengamankan setiap dana yang ada di desa sebagiannya akan digunakan untuk mengatasi kemiskinan, dan memperbaiki pendataan masyarakat kemiskinan sehingga semua masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Gunungkidul terdaftar secara keseluruhan. Seperti yang telah disampaikan oleh bapak Subiyantoro, SIP selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul, dalam wawancaranya :

“kami tidak menyerah dalam menghadapi kendala-kendala yang ada. kami menyelesaikan kendala tersebut dengan mengamankan setiap dana yang ada di desa itu sebagiannya akan digunakan untuk mengatasi kemiskinan, yang dimana ada peraturan bupati yang telah mengatur tentang penggunaan dana desa, dan kami akan memperbaiki dalam segi data sehingga semua masyarakat yang membutuhkan akan terdaftar dalam program ini”

Dengan demikian hasil wawancara penulis kepada narasumber terkait bagaimna cara menghadapi kendala tersebut yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul mengamankan setiap dana-dana desa yang dimana sebagiannya akan digunakan untuk mengatasi kemiskinan, dan akan memperbaiki pendataan masyarakat yang akan mengikuti program ini sehingga merata secara keseluruhan, dengan cara tersebut juga masyarakat akan secara otomatis berpartisipasi

aktif dengan melaporkan keadaan mereka sehingga dapat mengikuti program ini.

F. *Feedback* (Umpan Balik)

Feedback atau umpan baik yaitu tanggapan atau respon yang diberikan oleh komunikan atau penerima pesan yang dimana komunikan memberikan tanggapan atau jawaban kepada komunikator yaitu pembawa pesan. Adapun *feedback* Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat ini menurut salah satu masyarakat yang mengikuti program ini yaitu ibu Sumarti dan bapak Agus dalam wawancaranya mengatakan bahwa :

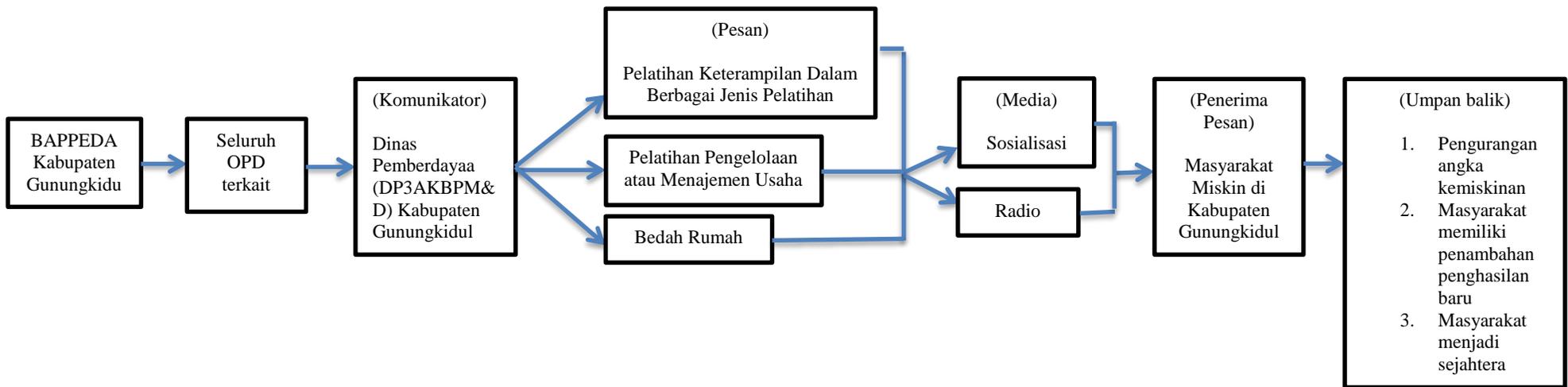
“(ibu Sumarti) dengan adanya program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ini saya merasa sangat terbantu dan merasa senang karena mendapatkan bantuan dari pemerintah serta banyak pelatihan-pelatihan yang menambah ilmu dan membantu usaha milik masyarakat”

“(bapak Agus) menurut saya masih ada beberapa masyarakat yang belum masuk dalam program ini, akan tetapi dengan adanya program ini saya senang dapat di bantu dan diperhatikan oleh pemerintah”

Dengan demikian dari hasil wawancara penulis dengan narasumber terkait respon dari masyarakat setelah adanya program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ini yaitu masyarakat sangat senang dan merasa terbantu sekali dengan adanya program ini dan antusias dalam berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang ada dalam program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ini akan tetapi menurut bapak Agus juga masih ada beberapa masyarakat yang belum terdaftar dalam program ini.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan proses komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul dalam program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.2 Proses Komunikasi Dinas P3AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul dalam Program penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat



Sumber : Gambar proses komunikasi diatas diolah dari hasil penelitian

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul atau DP3AKBPM&D dalam melaksanakan kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Manusia melaksanakan 3 Program utama yaitu pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis pelatihan, pelatihan pengelolaan atau manajemen usah, dan bedah rumah, dalam pelaksanaan program tersebut DP3AKBPM&D melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Gunungkidul, dan juga melakukan sosialisasi melalui media elektronik radio. Sosialisasi yang dilaksanakan ditujukan kepada masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Gunungkidul, yang dimana hasil atau pencapaian dari program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat ini yaitu penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, masyarakat memiliki penambahan penghasilan baru, dan masyarakat menjadi sejahtera.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan bab tiga diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ini terjadi komunikasi vertikal antar BAPPEDA kabupaten Gunungkidul dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul yang dimana BAPPEDA selaku pembuat program mengarahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kepentingan dalam program penanggulangan kemiskinan ini untuk menjalankan program tersebut. Dan dapat dilihat program penanggulangan sudah berjalan baik yang dimana angka kemiskinan yang menurun di Kabupaten Gunungkidul yang dimana ini membuktikan bahwa program penanggulang kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ini berjalan dengan baik.

Setelah dilakukan wawancara dan pembahasan mengenai komunikasi pemerintah daerah dalam program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, maka dapat diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Komunikator

Komunikator dalam program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul yang mana berperan sebagai mengsosialisasikan kegiatan-kegiatan yang ada dalam program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ini. Akan tetapi pihak yang berperan penting dalam pembuatan program penanggulangan kemiskinan ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gunungkidul yang dimana mengkoordinisir kepada dinas-dinas terkait dalam berjalan program penanggulangan kemiskinan ini, dan dari pembahasan tersebut sehingga dapat dilihat terjadinya komunikasi vertikal dari atas kebawah dan sebaliknya.

Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul dalam memperlancar berjalannya program

Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul dalam memperlancar berjalannya program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi, dan *face to face* sehingga dalam penyampaian kegiatan yang ada dalam program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ini dapat tersampaikan secara baik dan mudah di mengerti oleh masyarakat.

Komunikasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul dapat dikatakan sudah baik, karena program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ini mencapai tujuannya yaitu dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

2. Komunikasikan

Komunikasikan dari program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ini ditujukan kepada masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Gunungkidul agar dapat membantu masyarakat dalam memperbaiki perekonomiannya dan melatih keterampilan dalam membuka lapangan usaha sehingga perekonomian masyarakat membaik sehingga dapat menekan angka kemiskinan.

3. Pesan

Dalam komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Gunungkidul terkandung pesan yang ingin disampaikan yaitu, berupa materi terkait penjelasan tentang program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, tujuan dari program tersebut, dan kegiatan-kegiatan yang ada didalam program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dimana dengan adanya program tersebut akan sangat membantu masyarakat.

4. Media

Media yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu dengan media lisan yaitu sosialisasi dan *face to face* dan media elektronik yaitu radio, yang dimana media yang paling efektif yaitu media lisan karena dinas dan masyarakat berinteraksi langsung sehingga memudahkan masyarakat dalam mengetahui program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ini.

5. Kendala

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ini, yaitu kendala utamanya disegi dana yang tidak memadai sehingga menghambat berjalan dengan baiknya program dan masih adanya beberapa masyarakat yang belum terdaftar dalam program.

Cara menghadapi kendala tersebut yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul mengamanatkan setiap dana-dana desa yang dimana sebagaiannya akan digunakan untuk mengatasi

kemisikinan, dan akan memperbaiki pendataan masyarakat yang akan mengikuti program ini sehingga merata secara keseluruhan.

6. *Feedback* (Umpan Balik)

Respon dari masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang mengikuti program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ini yaitu sangat antusias dan mendapatkan respon baik dari masyarakat sekitar dan masyarakat juga berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan-kegiatan, serta sosialisasi yang ada.

B. SARAN

1. Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul pertahankan lagi dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Gunung kidul selalu mendapat perhatian dari pemerintah sehingga dapat menekan angka kemiskinan yang ada.
2. Kepada masyarakat Kabupaten Gunungkidul agar lebih semangat dan antusias lagi dalam mengikuti berbagai kegiatan yang ada dalam program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, sehingga program ini dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abidin, Y. Z. (2016). *Komunikasi Pemrintah : Filosofi, Konsep, dan Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abu, A. (2009). *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Corbin, A. S. (2003). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dilla, S. (2012). *Komunikasi Pembangunan*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Hasan, E. (2014). *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Huberman, M. B. (2007). *Analisi Dat Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, I. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Robbins, S. P. (2001). *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*,. Jakarta : Jilid 1. Edisi 8, Prenhallindo.
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, H. (2002). *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Suyanto, B. (2013). *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang: In-TRANS Publishing.
- Yusuf, A. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Habungan*. Jakarta: Prenadamedia Group

JURNAL

- Aji Muhawarman, D. A. (2017). Formulasi Kebijakan Komunikasi Untuk Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia Universitas Hasanuddin* 13(2).

- Bokau, I. N. (2013). Peranan Komunikasi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Boyong Atas (Suatu Studi Kepala Desa). *Jurnal Acta Diurna*, 2(3).
- Bonde, C. M. (2016). Peran Komunikasi Pemerintah Dalam Pembangunan Balai Desa Makaruo Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Acta Diurna*, 5(4).
- Dewi, M. (2016). Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kota Palembang Dalam Kampanye Program Palembang EMAS (Elok, Madani, Aman, Sejahtera). *Jurnal Komunikasi*.
- Indah Sulistiani, S. N. (2017). Peran Komunikasi Dalam Pengembangan Energi Sosial Masyarakat Di Papua. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan*.
- Kirana Kawengian, E. M. (2017). Peranan Komunikasi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Bersih Kampung (Studi Pada pemerintah Desa Lopan Satu Kecamatan Amurang Timur). *Jurnal Acta Diurna*, 6(2).
- Saudah, U. c. (2016). Model Komunikasi Pemerintah Untuk Kebijakan Akselerasi Peningkatan Status Pasar Tradisional-Modern. *UNEJ e-Proceeding*.
- Setiawan, M. I. (2014). Proses Komunikasi dalam Sosialisasi Pelestarian Kesenian Karinding Studi Deskriptif Mengenai proses Komunikasi dalam Sosialisasi Pelestarian Kesenian Karinding Oleh Abah Olot (Doctoral dissertation).
- Syarifuddin. (2014). Komunikasi Pemerintahan dan Masyarakat Berbasis dialek Budaya Lokal (Studi Kasus Proses Komunikasi Penunjang Pembangunan Berbasis Dialek Konjo pada Masyarakat di Tana Toa Kajang Kabupaten Bulukumba). *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 18(2), 247-257.

WEB :

<https://gunungkidulkab.bps.go.id> (diakses pada 25 April 2019 pukul 20.09 WIB)

LAMPIRAN

Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB,
Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul.



Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan



Pelatihan kegiatan dari program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Komunikator

1. Siapa saja yang berperan penting dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di Gunung Kidul ?
2. Kapan Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ini diluncurkan ?
3. Apa tujuan dan fungsi dari program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di kabupaten Gunung Kidul ?
4. Kegiatan-kegiatan apa sajakah yang dilakukan pada program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ?
5. Masyarakat apa saja yang wajib dilaporkan untuk program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat?
6. Apa saja dampak yang diberikan setelah adanya program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ini. Negatif atau positif ?
7. Apakah program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat berjalan dengan efektif ?
8. Apa sajakah hasil setelah program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ini dijalankan ?
9. Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Kidul ini dengan pihak-pihak terkait program yang dijalankan dalam mencapai tujuan bersama ?

B. Komunikan

10. Bagaimana respon masyarakat Kabupaten Gunung Kidul dengan adanya program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ?
11. Apakah dengan adanya program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sangat menguntungkan bagi masyarakat yang ada di kabupaten Gunung Kidul

C. Pesan

12. Bagaimana cara meyakinkan masyarakat Kabupaten Gunung Kidul bahwa program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dapat berdampak baik bagi masyarakat ?

D. Media

13. Media apa yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Kidul untuk memberikan informasi kepada masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ?

E. Umpan Balik

14. Bagaimana respon dari masyarakat ketika mengetahui adanya program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ?

15. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ?

F. Hambatan

16. Apa ada kendala dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ? Apa saja kendala yang dihadapi ?

17. Apakah ada masalah penggunaan bahasa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat ?

18. Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Kidul sudah menyampaikan secara jelas tentang program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat tidak salah menafsirkan tentang program tersebut ?

19. Apakah jarak menjadi hambatan bagi dinas dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ?

20. Bagaimana cara untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi ?